

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Mengenai Pidanaan Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Perspektif Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung” yang ditulis oleh Dwi Ramadhani, NIM. 2822133025, Pembimbing Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.H.

Kata kunci : Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Pidanaan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Ulama’, Tulungagung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wacana pemerintah yang membuat draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (draft RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang mana pada tahun 2010 dikabarkan telah sampai ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal yang menarik perhatian dan perdebatan masyarakat dalam draft RUU HMPA Bidang perkawinan tersebut adalah adanya pasal-pasal pidana pelanggaran kejahatan, yang mana salah satunya adanya gagasan kriminalisasi perkawinan *sirri*. Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA dan pihak yang mengawinkannya bisa pidana dengan hukuman denda ataupun penjara.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan mengenai pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan? (2) Bagaimana pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung apabila Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut disahkan ?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sedangkan observasi digunakan guna mengetahui bagaimana realita perkawinan yang tidak dicatatkan di lingkungan masyarakat yang dijadikan lokasi penelitian. Untuk analisa datanya menggunakan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) mayoritas ulama menyetujui adanya pidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dengan alasan untuk ketertiban, sedang kelompok yang tidak setuju beralasan bahwa pernikahan *sirri* itu sah, mengapa dipidanakan. 2) jika Draft RUU tersebut disahkan sangat setuju agar masyarakat menjadi tertib, dan ulama yang tidak menyetujui berpendapat daripada memidanakan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan lebih baik membuat peraturang yang menimbulkan madzarot yang lebih besar.

ABSTRACT

Thesis with the title “Draft of Religious Mterial Law on Marital Affairs Subject to Criminal Investigation Unclaimed Perspective of Scholars Districts Sumbergempol and Districts Tulungagung” written by Dwi Ramadhani, NIM. 2822133025, Advised. Hj. Nur Fadhillah, M.H.

Keywords: Draft of Religious Material Law Draft Law for Marriage, Criminalization, Unlinked Marriage, Sholars, Sumbergempol and Tulungagung Districts

This research is motivated by the existence of governmental discourse which draft of Draft of Law on Matter of Religious Law of Marriage Field (draft of Law on HMPA of Marriage Field) which in 2010 is rumored to have reached the National Legislation Program (Prolegnas). The thing that attracted the attention and public debate in the draft of HMPA Bill The field of marriage is the existence of articles of criminal offenders, one of which is the idea of criminalizing marriage sirri. The marriage offender not listed in the KUA and the party who marries it can be criminal with a fine or imprisonment.

The formulation of the problem in writing this thesis is (1) What is the opinion of Ulama Kecamatan Sumbergempol and Tulungagung Subdistrict on Draft of HMPA Draft of Marriage Bill concerning unregistered marriage actors? (2) What is the opinion of the Ulama of Sumbergempol and Tulungagung Sub-districts if the Draft of Law on HMPA on Marriage Field is ratified?

This research is a qualitative research that is descriptive analysis. In data collecting researcher use method of interview, observation and documentation. Interviews and documentation are used to extract information related to problem formulation. While the observation is used to find out how marriage ralita that is not listed in the community that used as the location of research. For data analysis using qualitative data analysis.

The results of this study reveal that: 1) the majority of scholars approved the conviction of married offenders who were not listed for reasons of order, while the disagreeable group reasoned that the marriage was legitimate, why it was criminalized. 2) if the Draft Bill is passed strongly agrees that the public be orderly, and scholars who disagree with opinion rather than criminalize married offenders who are not listed better make the regulator who raises the larger madzarot.